



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM
PEMILIHAN KETUA OSIS DI SMP NEGERI 38 SEMARANG
TAHUN 2016**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Prodi PPKn

UNNES
Oleh:
Amalia Putri Budiarti
NIM 3301413047

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 5 Agustus 2017

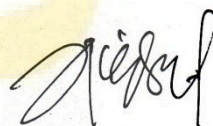
Menyetujui,

Pembimbing Skripsi I



Drs. Sumarno, M.A
NIP 195610101985031003

Pembimbing Skripsi II

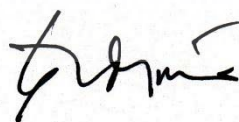


Drs. Setiajid, M.Si
NIP 196006231989011001

Mengetahui,

UNNES

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Drs. Tijan, M.Si.
NIP 19621120 1987021002

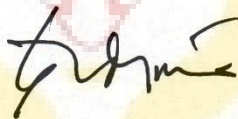
PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 21 Agustus 2017

Penguji Utama



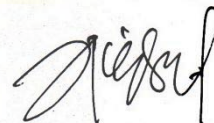
Drs. Tijan, M.Si.
NIP 19621120 1987021002

Penguji I



Drs. Sumarno, M.A.
NIP 195610101985031003

Penguji II



Drs. Setiajid, M.Si.
NIP 196006231989011001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan dari jiplakan karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Agustus 2017



Amalia Putri Budiarti
NIM 3301413047



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

1. Dan kepada Tuhan, berharaplah. (Q.S Al Insyirah:6-8)
2. Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam. (*Ir. Soekarno*)
3. Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh keringatmu adalah penyedapnya. (*Amalia Putri Budiarti*)

Persembahan:

Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Orangtua tercinta, Bapak Budi Sugianto dan Ibu Palastri yang senantiasa memberikan doa dan restunya sehingga saya terus berjuang.
2. Kakakku tersayang Awalia Novi Indrayani dan Muhsin, penyemangatku dalam menimba ilmu.
3. Sahabatku Divia, Fiki, Yuliana, Resti, Firstnadya, Elfina, Putri, Alfiana. Terimakasih selalu kebersamai dalam suka dan duka.
4. Keluarga Hima PKn angkatan 2014 dan 2015, terimakasih atas segala kenangan. Bersama kalian adalah masa paling berharga yang selalu kunanti untuk berkumpul kembali.
5. Teman-teman seperjuangan PPKn angkatan 2013 yang telah mewarnai masa perkuliahan S1 ini dengan indah.

PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya skripsi dengan judul “Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pemilihan Ketua OSIS di SMP Negeri 38 Semarang Tahun 2016” ini dapat terselesaikan.

Penyusunan karya tulis ini diselesaikan berkat bantuan dan motivasi dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan karya tulis ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Prof. Dr. Rustono, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
4. Drs. Sumarno, M.A, Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan dan arahan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Drs. Setiajid, M.Si, Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar dan memotivasi sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Orang tua penulis, terimakasih atas segala doa restu dan usaha yang telah diberikan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
7. Kepala SMP Negeri 38 Semarang yang telah berkenan memberikan izin untuk peneliti melakukan penelitian di SMP Negeri 38 Semarang.

8. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, Pembina OSIS, Siswa SMP Negeri 38 Semarang yang telah membantu, mendukung, dan memfasilitasi peneliti selama peneliti berlangsung.
9. Teman-teman PPKn 2013 senang bisa belajar dengan kalian.
10. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga amal baik dan bantuan yang telah diberikan senantiasa mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa dan apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, Agustus 2017



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penyusun

SARI

Budiarti, Amalia Putri. 2017. *“Implementasi Nilai-nilai Demokrasi dalam Pemilihan Ketua OSIS di SMP Negeri 38 Semarang Tahun 2016”*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Sumarno, M.A. Pembimbing II Drs. Setiajidi, M.Si. 135 halaman.

Kata kunci: Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi, Pemilihan Ketua OSIS

Demokrasi dalam sebuah pendidikan sangatlah penting untuk era globalisasi saat ini, sekolah demokratis yang dikelola dengan struktur apabila memungkinkan dengan adanya praktik-praktik demokrasi dapat terlaksana, serta melibatkan masyarakat dalam membahas program-program sekolah, prosedur pengambilan keputusan juga memperhatikan berbagai aspirasi publik, serta dapat dipertanggungjawabkan implementasinya kepada publik. Dalam hal berdemokrasi salah satu kegiatan implementasi nilai-nilai demokrasi yang paling terlihat di lingkungan sekolah adalah pada kegiatan pemilihan ketua OSIS. Pemilihan Ketua OSIS mampu mengembangkan nilai-nilai demokrasi yang dimiliki oleh siswa karena masing-masing siswa dapat menyalurkan suaranya dan ikut berpartisipasi secara langsung untuk memilih pemimpinnya. Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) mekanisme penerapan pemilihan ketua OSIS di SMP Negeri 38 Semarang Tahun 2016 secara demokratis. 2) faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemilihan ketua OSIS di SMP Negeri 38 Semarang Tahun 2016.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian yaitu mekanisme penerapan pemilihan ketua OSIS di SMP Negeri 38 Semarang Tahun 2016 secara demokratis, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemilihan ketua OSIS di SMP Negeri 38 Semarang Tahun 2016. Sumber data penelitian diperoleh dari Kepala Sekolah, Waka Kesiswaan, Pembina OSIS, Siswa, Ketua OSIS periode 2015/2016, serta dokumen data sekolahan mengenai kegiatan pemilihan ketua OSIS, daftar hadir peserta pemilihan ketua OSIS. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif. Uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai demokrasi saat pemilihan ketua OSIS tahun 2015-2016 dan periode tahun 2016-2017 sangat memiliki peningkatan atau pengaruh yang baik dimana siswa lebih memahami arti penting nilai-nilai demokrasi tersebut secara menyeluruh. Mekanisme pelaksanaan pemilihan ketua OSIS di SMP Negeri 38 Semarang Tahun 2016 secara demokratis ini menerangkan mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan ketua OSIS yang dilakukan secara demokratis dan dalam pelaksanaannya siswa dapat memahami tahapan atau alur pelaksanaan pemilihan tersebut. Faktor pendukung dan penghambat dalam pemilihan ketua OSIS di SMP Negeri 38 Semarang Tahun 2016, dapat dilihat dari sedikitnya tingkat golput yang

dilakukan pada saat pemilihan terjadi dan kurangnya berbuat curang saat kegiatan tersebut berlangsung.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: kepala sekolah selaku supervisi dan pemegang kekuasaan di sekolah haruslah lebih memberikan waktu persiapan yang panjang dalam pelaksanaannya biar tidak terkesan mendadak dan juga dapat berjalan dengan matang. Siswa hendaknya menyadari akan haknya dan juga bagaimana bersikap menjadi warga sekolah yang baik dengan peduli dan ikut berperan aktif dalam kegiatan tersebut, serta memiliki komitmen yang besar dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut, yaitu bertanggung jawab sebagai pemilik hak dan kewajiban sehingga akan terciptanya kehidupan yang demokratis.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan Istilah.....	7
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR.....	12
A. Deskriptif Teoretis	12
1. Nilai-Nilai Demokrasi	12
2. Pemilihan Ketua OSIS.....	24
B. Penelitian yang Relevan.....	26
C. Kerangka Berpikir.....	28
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN	33

A.	Latar Penelitian	33
B.	Fokus Penelitian.....	34
C.	Sumber data	35
D.	Alat dan Teknik Pengumpulan Data	36
E.	Uji Validitas Data	39
F.	Teknik Analisis Data.....	40
G.	Prosedur Penelitian	42
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A.	Hasil Penelitian	43
1.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	43
2.	Gambaran Umum Subjek Penelitian	47
3.	Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Ketua OSIS di SMP Negeri 38 Semarang Tahun 2016	47
4.	Mekanisme Penerapan Pelaksanaan Pemilihan Ketua OSIS di SMP Negeri 38 Semarang Secara Demokratis	56
5.	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Pemilihan Ketua OSIS di SMP Negeri 38 Semarang Tahun 2016	61
B.	Pembahasan.....	66
1.	Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Ketua OSIS di SMP Negeri 38 Semarang Tahun 2016	66
2.	Mekanisme Penerapan Pelaksanaan Pemilihan Ketua OSIS di SMP Negeri 38 Semarang Secara Demokratis	74
3.	Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemilihan Ketua OSIS di SMP Negeri 38 Semarang	76
BAB V	82
PENUTUP	82
A.	Simpulan	82
B.	Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Ekstrakurikuler.....	46
--------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir	31
Gambar 2. Gambar tampak depan SMP Negeri 38 Semarang.....	43
Gambar 3. Gambar saat berlangsungnya pemilihan Ketua OSIS	50
Gambar 4. Gambar saat mengisi daftar hadir dan mendapatkan surat suara	57
Gambar 5. Gambar saat berlangsungnya pemungutan surat suara	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Usulan Topik Skripsi.....	87
Lampiran 2. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi	88
Lampiran 3. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian.....	89
Lampiran 4. Instrumen Penelitian	90
Lampiran 5. Draft Pertanyaan Wawancara	91
Lampiran 6. Data Hasil Penelitian	102
Lampiran 7. Berita Acara Pemilihan Ketua OSIS	103
Lampiran 8. Daftar Hadir Peserta Pemilihan Ketua OSIS	126



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hakikat demokrasi adalah pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Kata “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintahan. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat, atau suatu pemerintahan dimana rakyat memegang kedaulatan tertinggi atau rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara (Suyahmo, 2015:1).

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, yang berarti mengutamakan adanya kepentingan rakyat. Demokrasi yang ada di Indonesia terdapat beberapa kemajuan tingkat partisipasi masyarakat, seperti pemilu pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan. Tetapi dengan adanya peningkatan tersebut masih ada juga sikap partisipasi yang rendah dalam jumlah yang tidak kecil, rakyat tidak tertarik dengan pemilihan suatu kepala daerah atau pemilihan presiden, dikarenakan beberapa alasan yang bermacam-macam sehingga mereka memilih untuk golput atau tidak menyalurkan hak suaranya. Maka kemajuan demokrasi di Indonesia akan menurun di tahun-tahun selanjutnya apabila tidak dikawal dengan baik oleh elemen masyarakat dan pemerintah.

Pemerintahan demokrasi dituntut adanya tanggung jawab pelaksanaan kegiatan pemerintahan, karena demokrasi merupakan pemerintahan rakyat. Tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan kepada rakyat itu wujudnya bisa secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya. Bentuk pemerintahan yang demokratis itu disusun berdasarkan kehendak rakyat dan menjalankan tugasnya untuk kepentingan rakyat. Penyusunan pemerintah yang demokratis itu biasanya dilakukan dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum yang melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam masyarakat. Sistem demokrasi di Indonesia, baik legislatif maupun eksekutif keduanya dipilih langsung oleh rakyat. Setelah keduanya dipilih, kemudian bersama-sama memperjuangkan aspirasi rakyat lewat kebijakan politik dan aturan hukum. Dalam memperjuangkan dan mewujudkan aspirasi rakyat itu keduanya harus berpijak pada nilai kebersamaan dan keadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Suyahmo, 2015:8).

Demokrasi dalam sebuah pendidikan sangatlah penting untuk era globalisasi saat ini, pendidikan demokrasi apabila dikelola dengan struktur yang memungkinkan dengan adanya praktik-praktik demokrasi dapat terlaksana, serta melibatkan masyarakat dalam membahas program-program sekolah, prosedur pengambilan keputusan juga memperhatikan berbagai aspirasi publik, serta dapat dipertanggungjawabkan implementasinya kepada publik. Pendidikan demokrasi tidak hanya diperoleh di lingkungan sekolah, tetapi juga dapat dilaksanakan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Lingkungan keluarga merupakan dunia pertama yang dapat memperkenalkan anak tentang nilai-nilai demokrasi. Orang tua sebagai pelaku utama dalam sebuah keluarga, maka dapat merencanakan untuk membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh anggota keluarga. Pembuatan peraturan-peraturan itu bisa dilakukan secara musyawarah dengan anggota keluarga, sehingga peraturan itu tidak akan memberatkan salah satu anggota keluarga. Peraturan tersebut akan berlaku dan bersifat menyeluruh tanpa ada yang merasa terbebani. Melalui contoh sederhana tersebut, maka akan muncul budaya demokrasi dalam sebuah keluarga, yang nantinya dapat menumbuhkan nilai-nilai demokrasi pada anak.

Disamping pengenalan demokrasi di lingkungan keluarga dan masyarakat, pendidikan juga merupakan hal yang sangat utama bagi kemajuan bangsa ini. Pada umumnya pendidikan dalam arti luas bertujuan untuk mensosialisasikan siswa ke dalam nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan dasar dari masyarakatnya. Pendidikan sejatinya adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi manusia agar memiliki karakter, integritas, dan kompetensi yang bermakna dalam kehidupan. Selama ini pendidikan masih terjebak pada pandangan dan praktik yang tidak membangun ruang pembelajaran yang bisa memperkaya nilai-nilai kemanusiaan, keluhuran, kejujuran, dan keadaban. Dengan demikian, sistem dan praktik pendidikan di negeri ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gagal dalam membangun karakter bangsa (Hanun dan Setyowati, 2013:535).

Dijabarkan di dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sehubungan dengan tujuan pendidikan nasional, dimana peserta didik tidak hanya berilmu namun harus bisa menjadi warga negara yang demokratis. Salah satu wadah yang tepat dalam mengimplementasikan nilai demokrasi adalah sekolah. Sekolah Menengah Pertama Negeri 38 Semarang merupakan salah satu sekolah yang menjunjung tinggi tata tertib peraturan yang dibuat oleh sekolah. Selain berusaha mengimplementasikan nilai-nilai ketertiban pada siswa, kemudian membangun fasilitas sekolah yang cukup memadai guna menunjang kegiatan pembelajaran siswa sehingga mencetak lulusan yang berprestasi, SMP Negeri 38 Semarang ini juga mempunyai strategi untuk mengimplementasi nilai-nilai demokrasi pada siswa.

Dalam hal berdemokrasi salah satu yang paling terlihat di lingkungan sekolah adalah pada kegiatan pemilihan ketua OSIS. Pemilihan Ketua OSIS mampu mengembangkan nilai-nilai demokrasi yang dimiliki oleh siswa karena masing-masing siswa dapat menyalurkan suaranya dan ikut berpartisipasi secara langsung untuk memilih pemimpinnya.

Berdasarkan hasil yang peneliti teliti salah satu faktor penyebabnya adalah sikap apatisme dan kurangnya kesadaran berdemokrasi terhadap

pemilihan ketua OSIS sendiri di SMP Negeri 38 Semarang. Dalam proses berdemokrasi yang kurang di sekolah tersebut peneliti menemukan permasalahan yang ada di SMP Negeri 38 Semarang, dimana sebelum diadakannya suatu sistem demokrasi yang benar di sekolah tersebut belum menggunakan sistem demokrasi yang sesuai seperti yang sudah banyak dilaksanakan di sekolah lain yang ada di Semarang. Di sekolah tersebut baru menggunakan sistem demokrasi yang benar pada tahun 2016 yang pada praktiknya seluruh siswa baru mengerti bagaimana berdemokrasi yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa pihak sekolah sadar betul bahwa negara ini menganut sistem pemerintahan demokrasi sehingga perlu diperkenalkan dan diimplementasikan nilai-nilai demokrasi pada siswa usia pelajar khususnya siswa SMP Negeri 38 Semarang. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut sekolah dapat mempraktikkan dengan adanya pemilihan ketua OSIS di sekolah dengan melalui sistem demokrasi yang sudah dilaksanakan di sekolah.

Dengan adanya pemilihan ketua OSIS di sekolah tersebut dapat diartikan sebagai pelaksanaan praktik berdemokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan pada siswa yang jiwa apatisme dan pendidikan demokrasi kurang mengerti bagaimana di negara ini yang menjunjung tinggi nilai demokrasi. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka cukup penting untuk dilakukan penelitian tentang "Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pemilihan Ketua Osis Di Smp Negeri 38 Semarang Tahun 2016".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme penerapan pelaksanaan pemilihan ketua OSIS di SMP Negeri 38 Semarang Tahun 2016 secara demokratis?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan ketua OSIS di SMP Negeri 38 Semarang Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. mekanisme penerapan pelaksanaan pemilihan ketua OSIS di SMP Negeri 38 Semarang Tahun 2016 secara demokratis
2. faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan ketua OSIS di SMP Negeri 38 Semarang Tahun 2016

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pendidikan demokrasi dalam berorganisasi di sekolah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan yang dapat digunakan sebagai referensi penelitian yang sejenis.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam implementasi nilai-nilai demokrasi melalui pemilihan ketua OSIS di SMP yang lain di Kota Semarang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Sekolah
 - 1) Memberikan pengetahuan tentang pemilihan ketua OSIS dengan menggunakan sistem demokrasi yang ada di Indonesia .
 - 2) Dapat meningkatkan kualitas sekolah dalam praktik berdemokrasi yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah lain yang ada di Kota Semarang.
 - b. Bagi guru
 - 1) Guru dapat mengetahui kesadaran siswa dalam mengetahui cara berdemokrasi yang benar.
 - 2) Guru dapat memberikan masukan khususnya kepada Waka Kesiswaan dan pendamping OSIS untuk lebih mengarahkan kegiatan pemilihan ketua OSIS dengan menggunakan sistem demokrasi yang benar dan juga sebagai wujud partisipasi demokrasi warga sekolah yang demokratis.

E. Batasan Istilah

Untuk mewujudkan satu kesatuan berfikir dan menghindari salah tafsir, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah:

1. Implementasi

Implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Implementasi bisa juga diartikan sebagai evaluasi. Selain itu, implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Jika dalam suatu kebijakan, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Dalam penelitian ini, implementasi lebih diarahkan pada pelaksanaan atau penerapan, pengamatan dan seberapa jauh hal yang telah dilakukan.

2. Nilai-nilai Demokrasi

Nilai adalah sesuatu yang berharga, baik, dan berguna bagi manusia. Nilai adalah suatu penetapan atau suatu kualitas yang menyangkut jenis dan minat. Nilai adalah suatu penghargaan atau suatu kualitas terhadap suatu hal yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku manusia, karena suatu itu (1) Berguna (2) Keyakinan (3) Memuaskan (4) Menarik (5) Menguntungkan (5) Menyenangkan (Winarno, 2007:3).

Sementara itu, demokrasi yang hakikatnya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu secara ontologis substansial mengandung keseimbangan, keseimbangan antara rakyat yang memilih dengan pemimpin yang dipilih, keseimbangan antara aspirasi, kepentingan rakyat dengan tugas pemimpin yang harus memenuhinya.

Keseimbangan antara ketaatan, kepatuhan, kelayakan rakyat dengan pemberian pemimpin terhadap rakyat (Suyahmo, 2015:2).

Dengan demikian dapat disimpulkan demokrasi pada hakikatnya adalah sejalan dengan substansi keadilan. Artinya, jika nilai demokrasi dipahami, disikapi, dan dilaksanakan secara benar dan konsisten maka akan menimbulkan rasa keadilan bagi semua orang (Suyahmo, 2015:2).

Sukarno (2013:80) menyatakan tanpa adanya implementasi nilai-nilai demokrasi ini, suatu pemerintahan akan sulit ditegakkan. Adapun nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut: kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan antar warga, kesetaraan gender, kedaulatan rakyat, rasa percaya (*trust*), dan kerjasama.

Jadi nilai-nilai demokrasi yang seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan antar warga, kesetaraan gender, kedaulatan rakyat, rasa percaya (*trust*), dan kerjasama dapat tertanam dan tumbuh dalam diri siswa melalui pemilihan ketua OSIS yang dimana dalam kegiatannya merupakan salah satu implementasi dari nilai-nilai demokrasi.

3. Pemilihan Ketua OSIS

Dalam proses pemilihan ketua OSIS tersebut sebagai wadah siswa untuk mengimplementasikan hasil belajar kewarganegaraan para siswa yang sudah didapatkan saat kegiatan belajar di sekolah, serta siswa

dapat menggunakan hak suara masing-masing peserta didik untuk memilih salah satu ketua OSIS di sekolah.

Sarbaini, dkk (2015:811) menyatakan bahwa Pemilihan Ketua OSIS merupakan sarana pembelajaran demokrasi. Hal ini tentunya menjadi wadah bagi siswa untuk ikut serta dalam pelaksanaan demokrasi. Pembelajaran demokrasi secara praktek langsung tentunya sangat bagus bagi siswa. Terutama memberikan pengalaman siswa dalam proses pemilihan-pemilihan yang nantinya diperoleh siswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pemilihan langsung dapat memberikan pelajaran kepada siswa tentang proses demokrasi secara terbuka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Deskriptif Teoretis

1. Nilai-Nilai Demokrasi

a. Pengertian Nilai

Winarno (2007:3) menyatakan nilai adalah sesuatu yang berharga, baik, dan berguna bagi manusia. Nilai adalah suatu penetapan atau suatu kualitas yang menyangkut jenis dan minat. Nilai adalah suatu penghargaan atau suatu kualitas terhadap suatu hal yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku manusia, karena suatu itu: (1) berguna, (2) keyakinan, (3) memuaskan, (4) menarik, (5) menguntungkan, dan (6) menyenangkan. Dengan demikian secara sederhana, nilai (*value*) adalah sesuatu yang berharga.

Sukarno (2013:23-24) menyatakan dalam kehidupan, nilai itu banyak sekali jumlah dan sangat bervariasi. Nilai yang banyak tersebut dapat diklasifikasikan atau digolong-golongkan. Nilai juga memiliki tingkatan. Adapun menurut Prof. Notonegoro (dalam Sukarno 2013:23), nilai ada 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut.

- 1) Nilai material, sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia.
- 2) Nilai vital, sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan.
- 3) Nilai kerohanian yang dibedakan menjadi 4 (empat) macam: (1) nilai kebenaran (2) nilai estetika (3) nilai kebaikan (4) nilai religius.

Nilai bersifat abstrak, seperti sebuah ide, dalam arti tidak dapat ditangkap melalui indra, yang dapat di tangkap adalah objek yang memiliki nilai. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Misalnya nilai keadilan, kesederhanaan. Orang hidup mengharapkan mendapat keadilan. Kemakmuran adalah keinginan setiap orang. Jadi, nilai bersifat normatif, suatu keharusan (*das sollen*) yang menuntut diwujudkan dalam tingkah laku (Winarno, 2007:3).

Semakin memiliki klasifikasi, nilai mempunyai tingkatan-tingkatan. Nilai-nilai itu dalam realitasnya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain. Max Scheler (dalam Sukarno 2013:25) mengatakan nilai-nilai itu tidak sama luhurnya dan tidak sama tingginya (Sukarno, 2013:25).

Winarno (2007:5) menyatakan dalam filsafat Pancasila juga disebutkan bahwa ada 3 (tiga) tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradap, nilai persatuan, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara singkat dinyatakan bahwa nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Nilai-nilai Pancasila tersebut termasuk nilai etik atau nilai moral. Nilai-nilai dalam Paancasila termasuk dalam tingkatan nilai dasar. Nilai ini mendasari nilai berikutnya, yaitu nilai instrumental. Nilai dasar itu mendasari semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai dasar bersifat fundamental dan tetap (Winarno, 2007:5).

b. **Pengertian Demokrasi**

Wibisono (dalam Suyahmo 2015:1) menyatakan membahas demokrasi berarti menghadapkan kita pada suatu kompleksitas permasalahan yang klasik, fundamental, namun tetap aktual. Dikatakan klasik karena masalah demokrasi sudah menjadi fokus perhatian dalam wacana filsafati semenjak jaman Yunani Kuno, dan telah diterapkan di polish Athena. Fundamental karena hakikat demokrasi menyentuh nilai-nilai dasar kehidupan tentang apa dan bagaimana sistem kehidupan itu akan dipengaruhi di mana manusia sendiri menjadi subyek dan sekaligus dijadikan obyeknya. Aktual karena dewasa ini demokrasi menjadi dambaan setiap bangsa dan negara untuk menerapkannya, termasuk bangsa Indonesia dalam era reformasi ini.

Kata “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat, atau suatu pemerintahan di mana rakyat memegang kedaulatan tertinggi atau rakyat diikutsertakan dalam

pemerintahan negara. Dengan diikutsertakannya rakyat dalam pemerintahan berarti semua ikut bertanggung jawab dalam pembangunan negara (Suyahmo, 2015:1).

Mufti dan Naafisah (2013:29-30) menyatakan demokrasi menuntut adanya partisipasi aktif dari rakyat dalam proses pengambilan kebijakan politik. Rakyat dilibatkan dalam pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kepentingan rakyat dapat tercermin dalam kebijakan-kebijakan pemerintahnya. Setiap kebijakan pemerintah merupakan cerminan atau representasi kepentingan rakyat. Dalam pandangan Hobbes (dalam Mufti dan Naafisah 2013:41), yang terkait dengan *Leviathan*, demokrasi memiliki sedikit arti penting. Berpikir bahwa *self preservation* merupakan tujuan utama manusia, dan bahwa masyarakat harus diatur untuk membatasi hasrat kekerasan manusia, Hobbes (dalam Mufti dan Nafisah 2013:41) menyatakan bahwa konsentrasi kekuasaan (*concentration of power*) diletakkan pada suatu tempat yang dinamakan kedaulatan (*soverighn*).

Sistim politik demokrasi suatu negara berkaitan dengan dua hal yaitu institusi (struktur) demokrasi dan perilaku (kultur) demokrasi. Analisis Gabriel Almond dan Sidney Verba (dalam Winarno 2007:110-111) menyatakan bahwa kematangan budaya politik akan tercapai bila ada keserasian antara struktur dengan kultur, maka membangun masyarakat demokratis berarti usaha

menciptakan keserasian antara struktur yang demokratis dengan kultur yang demokratis. Masyarakat demokratis akan terwujud bila di negara tersebut terdapat institusi demokrasi dan sekaligus berjalannya perilaku demokrasi.

Jadi demokrasi tidak hanya memerlukan institusi, hukum, aturan ataupun lembaga-lembaga negara lainnya. Demokrasi sejati memerlukan sikap dan perilaku hidup demokratis masyarakatnya. Demokrasi ternyata memerlukan syarat hidupnya yaitu warga negara yang memiliki dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Tersedianya kondisi ini membutuhkan waktu lama, berat, dan sulit. Oleh karena itu, secara substantif berdimensi jangka panjang, guna mewujudkan masyarakat demokratis, pendidikan demokrasi mutlak diperlukan. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara Winarno (2007:111).

c. Pendidikan Demokrasi

Secara teoretis menurut Gandar dan Finn (dalam Winataputra 2012:28) terutama di negara berkembang pendidikan demokrasi sering dianggap “...*taken for granted or ignored*”, yakni dianggap akan terjadi dengan sendirinya atau malah dilupakan. Sesungguhnya, mereka tegaskan bahwa pendidikan demokrasi seyogyanya ditempatkan sebagai bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu pendidikan demokrasi perlu dilihat

dalam dua seting besar, yakni “*school-based democracy education*”, yakni pendidikan demokrasi dalam konteks atau berbasis pendidikan formal, dan “*society-based democracy education*”, yakni pendidikan demokrasi dalam konteks atau yang berbasis kehidupan masyarakat.

Sementara itu, seperti dikemukakan oleh Winataputra (2012:29) bahwa belum berhasilnya pendidikan demokrasi di Indonesia secara mendasar karena belum dikembangkannya paradigma pendidikan demokrasi yang sistemik sehingga upaya pengembangan “*civic intelligence, civic participation and civic responsibility*” melalui berbagai dimensi “*civic education*” sebagai wahana utama pendidikan demokrasi tak bisa diwujudkan secara optimal.

Hal itu tampaknya diperkuat oleh lingkungan sosial kultural dan sosial politik yang tidak kondusif, yang memang sejak tahun 1945 sampai saat ini terkesan masih menunjukkan ciri “*undemocratic democracy*” Sumantri (dalam winataputra 2012:29), yakni suatu keadaan dimana perangkat demokrasinya sudah ada, tetapi semangat dan perwujudannya masih jauh dari cita-cita demokrasi, yang memang dirasakan selalu menimbulkan kontroversi atau paradoksal antara realita dengan norma, antara yang dilihat, didengar, dan dialami dengan yang diajarkan/diceramahkan/dipidatokan. Secara psikologis dan sosial keadaan seperti itu tidak menguntungkan bagi proses pendidikan karena keadaan lingkungan

sekitar hanya memberi “*negative reinforcement*” atau penguatan negatif terhadap tumbuhnya sikap dan perilaku yang positif.

Winataputra (2012:31) mengungkapkan strategi dasar pendidikan nilai demokrasi yang seyogyanya dikembangkan adalah strategi pemanfaatan aneka media dan sumber belajar (*multi media and resources*), kajian interdisipliner (*interdisciplinary studies*), pemecahan masalah sosial (*problem solving*), penelitian sosial (*social inquiry*), aksi sosial (*social involvement*), pembelajaran berbasis portfolio (*portfolio-based learning, powerful learning (meaningful, integrative, value-based, challenging, and active)*).

d. Nilai-nilai Demokrasi

Nashir (dalam Sukarno 2013:80-86) menyatakan nilai-nilai demokrasi ialah nilai-nilai yang diperlukan dalam mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan nilai-nilai inilah sebuah pemerintahan demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa adanya implementasi nilai-nilai demokrasi ini, suatu pemerintahan akan sulit ditegakkan. Adapun nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kebebasan Berpendapat

Kebebasan menyatakan pendapat adalah hak bagi warga negara biasa yang wajib dijamin dengan undang-undang dengan sebuah sistem politik demokrasi Dahl (dalam Sukarno 2013:80). Kebebasan ini diperlukan karena kebutuhan rakyat untuk

menyatakan pendapatnya yang senantiasa muncul pada setiap diri warga negara di era pemerintahan yang terbuka saat ini. Hak menyampaikan pendapat ini wajib dijamin oleh pemerintah, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bentuk kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah maupun swasta. Semakin cepat dan efektif cara pemerintah memberikan tanggapan semakin tinggi pula kualitas demokrasi pemerintahan tersebut (Sukarno, 2013:80).

2) Kebebasan Berkelompok

Sukarno (2013:81) menyatakan kebebasan berkelompok dalam suatu masyarakat untuk membentuk organisasi merupakan dasar nilai demokrasi yang diperlukan bagi setiap warga negara. Kebebasan berkelompok ini diperlukan untuk menghimpun kesamaan pendapat visi misi untuk diperjuangkan maka diperlukanlah organisasi, misalnya organisasi mahasiswa, organisasi pelajar, partai politik, organisasi kepemudaan, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi buruh, dan lain sebagainya. Kebutuhan berkelompok merupakan naluri dasar manusia yang tidak mungkin diingkari karena pada dasarnya manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial (*zoon politikon*). Di era modern, kebutuhan berkelompok ini

tumbuh semakin kuat, karena persoalan–persoalan yang muncul di masyarakat semakin kompleks sehingga sering kali memerlukan organisasi untuk menemukan jalan keluar misalnya, dalam bidang organisasi sosial keagamaan yakni NU dan Muhammadiyah yang berkiprah dalam pengentasan anak yatim, terlantar, memerangi kebodohan, kemiskinan, dan lain-lain, dalam bidang partai politik lahirlah partai-partai baru di luar Partai Golkar, PPP, dan PDI-P.

3) Kebebasan Berpartisipasi

Sukarno (2013:81-82) menyatakan kebebasan berpartisipasi pada hakikatnya merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok. Jenis partisipasi **pertama** adalah menyalurkan hak suara dalam pemilihan umum baik di tingkat daerah maupun pusat. Di Indonesia pemberian suara dalam pemilihan umum dipersepsikan sebagai kebebasan berpartisipasi dalam bidang politik. Dalam demokrasi, tidak dibenarkan memprovokasi masyarakat untuk memberikan suara dengan jalan kekerasan.

Bentuk partisipasi **kedua** yang belum berkembang yakni kontak atau hubungan dengan pejabat pemerintah. Kontak langsung dengan pejabat pemerintah ini akan semakin dibutuhkan karena kegiatan pemberian suara secara reguler (pemilihan

anggota DPR/Presiden dalam perkembangannya tidak akan memberikan kepuasan bagi masyarakat karena apa yang dijanjikan oleh anggota DPR belum tentu ditepati sehingga diperlukan kontak langsung bagi anggota DPR untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Sukarno, 2013:82).

Bentuk partisipasi yang **ketiga** yang diperlukan negara demokrasi agar sistem politik bekerja lebih baik. Pernyataan protes atau unjuk rasa terhadap kebijakan kenaikan harga BBM, sembako, tarif dasar listrik, pajak, adalah bagian proses daripada demokrasi sejauh hal itu diadakan untuk memperbaiki kebijakan pemerintah (Sukarno, 2013:82).

Bentuk partisipasi yang **keempat** adalah mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik mulai dari pemilihan lurah, bupati, gubernur, anggota DPR hingga Presiden sesuai dengan sistem pemilihan yang berlaku. Bentuk partisipasi ini adalah mencalonkan diri dalam satu jabatan sangat diperlukan dalam penerapan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian para calon pejabat diharapkan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jabatan yang disandang di pundaknya atau beban yang diberikan kepadanya (Sukarno, 2013:82).

4) Kesetaraan Antar Warga

Sukarno (2013:82) menyatakan kesetaraan atau egalitarianisme merupakan salah satu nilai fundamental yang diperlukan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Kesetaraan ini diartikan sebagai adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Kesetaraan memberi tempat bagi setiap warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nilai ini diperlukan karena masyarakat Indonesia bersifat heterogen.

5) Kesetaraan Gender

Sukarno (2013:83) menyatakan kesetaraan gender adalah kedudukan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di depan hukum, laki-laki dan perempuan mempunyai kodrat yang sama sebagai makhluk sosial (*zoom politikon*). Laki-laki maupun perempuan memiliki akses yang sama dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, demokrasi tanpa kesetaraan gender akan berdampak pada ketidakadilan sosial.

6) Kedaulatan Rakyat

Sukarno (2013:84) menyatakan kedaulatan rakyat adalah rakyat berkuasa dalam menentukan pemerintahan. Pemerintahan dengan sendirinya berasal dari rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Rasa ketergantungan pemerintah terhadap rakyat

inilah yang kemudian menghasilkan makna *akuntabilitas*. Politisi yang *accountable* adalah politisi yang menyadari bahwa dirinya berasal dari rakyat.

7) Rasa Percaya (*Trust*)

Sukarno (2013:84) menyatakan rasa saling percaya antar suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada dalam masyarakat merupakan nilai dasar yang diperlukan agar demokrasi dapat terbentuk. Suatu pemerintahan demokrasi akan sulit berkembang apabila rasa saling percaya satu sama lainnya tidak tumbuh. Apabila tidak ada rasa saling percaya yang akan terjadi adalah ketakutan, kecurigaan, kekhawatiran, dan permusuhan, hubungan antar kelompok masyarakat akan terganggu secara permanen.

8) Kerja Sama

Sukarno (2013:85) menyatakan kerjasama diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Kerjasama hanya akan mungkin terjadi jika setiap orang atau kelompok bersedia untuk mengorbankan sebagian dari apa yang diperoleh dari kerjasama tersebut. Kerjasama bukan berarti menuntut munculnya perbedaan pendapat antar individu atau kelompok. Tanpa perbedaan kelompok perbedaan pendapat demokrasi tidak mungkin berkembang.

2. Pemilihan Ketua OSIS

1) Sistem Pemilihan Umum

Budiardjo, (2008:461) menyatakan dikebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying*, dan sebagainya.

Budiardjo, (2008:461-462) menyatakan dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu :

- 1) *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik).
- 2) *Multi-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional)

Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004 bangsa Indonesia telah menyelenggarakan sembilan kali pemilihan umum, yaitu

pemilihan umum 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004. Dari pengalaman sebanyak itu, pemilihan umum 1955 dan 2004 mempunyai kekhususan atau keistimewaan dibanding dengan yang lain. Semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang *vacum*, melainkan berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum itu sendiri. Dari pemilihan umum-pemilihan umum tersebut jga dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia (Budiardjo, 2008:473).

2) Pemilihan Ketua OSIS

Hanun dan Setyowati, (2013:539-540) menyatakan kegiatan pemilihan pengurus OSIS diprakasai oleh pengurus OSIS, suatu kegiatan untuk memilih anggota-anggota pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris serta beberapa sekbid dan anggota-anggotanya. Pemilihan tersebut dilakukan dengan menggunakan Pemilu seperti halnya bangsa Indonesia ketika hendak memilih presiden dan wakilnya.

Pemilihan Ketua OSIS di SMP Negeri 38 Semarang ini dirancang sedemikian rupa sehingga hampir mirip dengan Pemilu pada tatanan pemerintahan. Sehingga siswa di sekolah tersebut dapat memahami pemilihan ketua OSIS ini sebagai suatu sarana berdemokrasi di lingkungan sekolah dan dapat memberikan

pengetahuan yang luas mengenai nilai-nilai demokrasi dalam suatu kegiatan pemilihan ketua OSIS tersebut.

B. Penelitian yang Relevan

Setelah melakukan telaah dan analisis terhadap hasil-hasil penelitian tentang nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan ketua OSIS, tulisan yang dianggap relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Hendra Irawan (2010) dalam skripsinya yang berjudul “*Pelaksanaan Budaya Demokrasi Dalam Pemilihan Ketua HMJ Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang*”, dimana tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk mendeskripsikan proses penetapan calon ketua HMJ Hukum dan Kewarganegaraan. (2) Untuk mendeskripsikan proses sosialisasi calon ketua HMJ Hukum dan Kewarganegaraan. (3) Untuk mendeskripsikan proses pemilihan ketua HMJ Hukum dan Kewarganegaraan. (4) Untuk mendeskripsikan proses penetapan ketua HMJ Hukum dan Kewarganegaraan. (5) Untuk mendeskripsikan proses pelantikan ketua HMJ Hukum dan Kewarganegaraan. (6) Untuk mendeskripsikan sikap calon yang menang dan calon yang kalah. Hasil penelitian ini adalah didapatkannya gambaran permasalahan mengenai budaya demokrasi dalam pemilihan ketua HMJ Hukum dan Kewarganegaraan yang meliputi (1) penetapan calon ketua HMJ sudah menetapkan budaya demokrasi, (2) proses sosialisasi calon ketua HMJ, (3) pemilihan ketua HMJ yang sudah menerapkan budaya demokrasi, (4) penetapan ketua HMJ dalam tahap ini terlebih dahulu dilakukan

perhitungan suara yang proses perhitungan suara sudah memenuhi ciri-ciri pemilihan umum yang demokratis yaitu kejujuran dalam perhitungan suara, (5) pelantikan ketua HMJ yang terlaksana dalam proses spesialisasi ini adalah : persamaan, tata pada aturan dan prosedur yang berlaku, solidaritas. (6) para kandidat dalam menerima hasil pemilu menunjukkan sikap mencerminkan budaya demokrasi. Adapun sikap calon yang menang mencerminkan budaya demokrasi yaitu : tidak merayakan kemenangan dengan berlebihan, tidak menunjukkan sikap arogan atau emosional atas kemenangan, tidak bersikap pamer kepada calon yang kalah.

2. Rini Yuliana (2013) dalam skripsinya yang berjudul "*Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di SMP Negeri 3 Gringsing Batang*" dimana tujuan dari penelitian ini yaitu (1) mengetahui lebih jelas bagaimana pelaksanaan atau implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang (2) Mengetahui lebih jelas faktor-faktor yang menjadi penunjang dan penghambat dalam implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang. Hasil penelitian ini adalah didapatkannya gambaran permasalahan mengenai nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan melalui pembelajaran PKn di sekolah tersebut adalah nilai-nilai: Toleransi, kerjasama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok, menghormati orang

lain, kepercayaan diri dan kesadaran akan perbedaan. Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PKn di SMP Negeri 3 Gringsing Batang telah dilaksanakan melalui metode diskusi, ceramah, tanya jawab, penugasan, dan demonstrasi.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti susun ialah pada penelitian yang pertama persamaannya ialah menunjukkan *locus* atau sasaran penelitian yang sama yaitu nilai-nilai demokrasi, dan perbedaannya ialah pada penelitian yang pertama fokus penelitiannya yaitu budaya demokrasi dalam pemilihan umum sedangkan peneliti memfokuskan pada budaya demokrasi. Penelitian yang kedua persamaannya ialah dari nilai-nilai demokrasi sedangkan perbedaannya ialah pada penelitian yang kedua ini lokusnya atau sasaran penelitiannya ialah nilai demokrasi dalam sebuah metode pembelajaran PKn sedangkan peneliti memfokuskan penelitiannya di SMP Negeri 1 Gringsing Batang.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan telaah pustaka dan beberapa definisi konseptual yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dengan jelas alur pemikiran peneliti yang berkaitan dengan implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan ketua OSIS di SMP Negeri 38 Semarang. Adapun kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut

Gambar 1. Kerangka Berpikir



Seperti yang diuraikan pada kajian teori, nilai-nilai demokrasi tentunya akan dapat tumbuh dan berkembang dalam diri manusia apabila diimplementasi dalam sebuah kehidupan, begitu pula pada siswa SMP, tentunya materi tentang demokrasi telah mereka dapatkan dari pembelajaran di kelas, sehingga sebuah wadah untuk mempraktikkan kegiatan tersebut, salah satunya adalah melalui, kegiatan pemilihan ketua OSIS yang ada di sekolah masing-masing, tetapi dalam pelaksanaannya tentunya terdapat beberapa kendala seperti halnya siswa tidak mengerti cara berdemokrasi dengan benar, antusias siswa yang kurang karena tidak adanya sosialisasi dalam pemilihan ketua OSIS tersebut. Oleh karena itu di SMP Negeri 38 Semarang memberikan solusi yang bisa membuat kualitas sekolah lebih maju dengan melaksanakan pemilihan ketua OSIS secara demokratis melalui tata cara pemilihan umum seperti pada aturan pemilihan umum di tingkat pemerintahan, dengan adanya cara tersebut siswa bisa langsung mempraktekkan langsung sistem demokrasi secara terbuka dan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya serta dapat menumbuhkan nilai-nilai demokrasi bagi siswa yang nantinya dapat mewujudkan masyarakat yang demokratis sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Mekanisme penerapan pemilihan ketua OSIS di SMP Negeri 38 Semarang Tahun 2016 secara demokratis ini menerangkan mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan ketua OSIS yang dilakukan secara demokratis yaitu melakukan musyawarah bersama memilih/seleksi calon ketua OSIS yang akan diajukan, memberikan waktu untuk setiap calon kandidat yang terpilih tersebut melakukan sosialisasi/kampanye memperkenalkan diri serta menjelaskan visi dan misinya, melakukan debat dengan saling menjelaskan maksud dari visi misi yang mereka buat dan menjawab beberapa pertanyaan yang di berikan kepada panelis, pemungutan surat suara yang dilakukan secara urut dan sistematis, perhitungan surat suara yang dilakukan secara terbuka, dan pengumuman hasil ketua terpilih juga dengan terbuka saat itu juga. Hal tersebut mendapatkan respon yang sangat baik kepada pihak sekolah dan akan dilakukan sistem tersebut di tahun periode berikutnya.
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam pemilihan ketua OSIS di SMP Negeri 38 Semarang Tahun 2016. Dengan hal tersebut untuk hasil dari suatu implementasi nilai-nilai demokrasi akan juga menghasilkan salah satu dengan kesadaran demokrasi pada siswa tentunya, diadakannya

salah satu kegiatan pemilihan ketua OSIS tersebut dan dengan menggunakan sistem pemilihan yang baru siswa dapat memiliki kesadaran memilih yang semakin maju dari tahun sebelumnya. Karena pada tahapan ini siswa lebih memberikan efek positif karena cara yang berbeda dari sebelumnya dan siswa lebih memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kesadaran tersebut dapat dilihat dari sedikitnya tingkat golput yang dilakukan pada saat pemilihan terjadi dan kurangnya berbuat curang saat kegiatan tersebut berlangsung.

B. Saran

1. Kepada Kepala Sekolah

Untuk kepala sekolah selaku supervisi dan pemegang kekuasaan di sekolah haruslah lebih memberikan waktu persiapan yang panjang dalam pelaksanaannya biar tidak terkesan mendadak dan juga dapat berjalan dengan matang.

2. Kepada Siswa

Siswa hendaknya menyadari akan haknya dan juga bagaimana bersikap menjadi warga sekolah yang baik dengan peduli dan ikut berperan aktif dalam kegiatan tersebut, serta memiliki komitmen yang besar dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut, yaitu bertanggung jawab sebagai pemilik hak dan kewajiban sehingga akan terciptanya kehidupan yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Daroeso, Bambang. 1986. *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. 2011. *Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moeleong, Lexy. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mufti dan Naafisah. 2013. *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nasdian, Tony fredian. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Rachman, Maman. 2015. *5 Pendekatan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Mixed, PTK, R&D*. Yogyakarta: Magnum.
- Rosyada, Dede dkk. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*. Tim ICCE UIN Jakarta: Prenada Media.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukarno. 2013. *Paradigma Baru Pendidikan kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyahmo. 2015. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Winarno. 2007. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Bumi aksara.

Undang-Undang

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Internet

Winataputra, Udin Saripudin. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan: Refleksi Historis Epistemologis Dan Rekonstruksi Untuk Masa Depan* (http://repository.ut.ac.id/6032/1/2013_142.pdf di akses pada tanggal 28 Juli 2017).

Skripsi, Thesis, Jurnal

Hanun dan Setyowati. *Strategi Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi Pada Siswa Di Madrasah Aliyah Negeri Lamongan*. Kajian Moral dan Kewarganegaraan Volume 1 Nomor 3 Tahun 2013

Irawan Hendra. 2010. *Pelaksanaan Budaya Demokrasi Dalam Pemilihan Ketua HMJ Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang*. Skripsi. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang.

Lestari dan Yani. *Implementasi Budaya Demokrasi Dalam Kegiatan OSIS Di SMPN 1 Tarik Kabupaten Sidoarjo*. Kajian Moral dan Kewarganegaraan Volume 02 Nomor 04 Tahun 2016, 533-547.

Sarbaini dkk. *Persepsi Siswa Terhadap Pemilihan Ketua OSIS Di SMA KORPRI Banjarmasin Dilihat Dari Nilai-Nilai Demokrasi*. Jurnal Pendidikan kewarganegaraan: Volume 5, Nomor 10, November 2015.

Yuliana Rini. 2013. *Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan Di SMP Negeri 3 Gringsing batang*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.